

TESIS

**TINDAKAN TENAGA MEDIS TANPA
PERSETUJUAN PASIEN DALAM SITUASI
KEGAWATDARURATAN**



Oleh
HENDRA SETIAWAN
NIM : 2320215310019

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025

**TINDAKAN TENAGA MEDIS TANPA
PERSETUJUAN PASIEN DALAM SITUASI
KEGAWATDARURATAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

HENDRA SETIAWAN

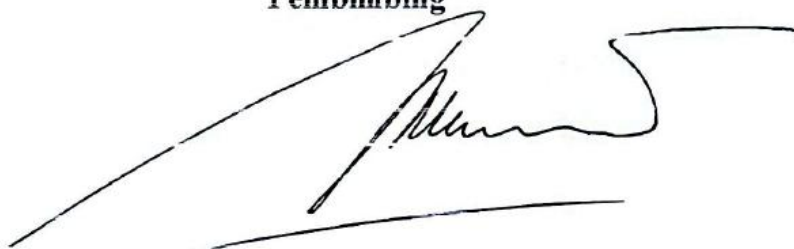
NIM. 2320215310019

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

Judul Tesis : TINDAKAN TENAGA MEDIS TANPA PERSETUJUAN PASIEN
DALAM SITUASI KEGAWATDARURATAN
Nama : Hendra Setiawan
NIM : 2320215310019

Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing



Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M. Hum.
NIP. 196106191986031015

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004



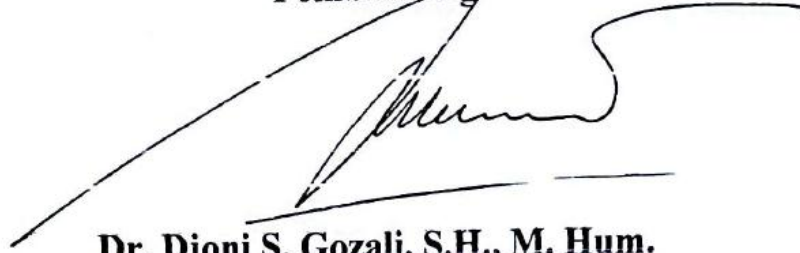
Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tangga Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

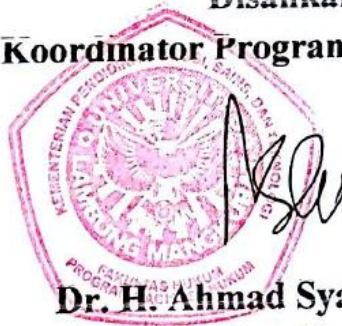
Pembimbing



Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M. Hum.

NIP. 196106191986031015

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

NIP. 19720208 199903 1 004

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

**Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 22 Juli 2025**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Anggota : Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.

MOTTO

Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.

Sebagaimana dalam Al Qur'an

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat

(QS : Al Mujadalah Ayat 11)

PERSEMBAHAN

Segala Puji Bagi ALLAH SWT Tuhan Semesta Alam atas segala karunia, rahmat, serta hidayah yang dilimpahkan kepada hambamu ini , Syalawat dan Salam semoga tercurah Kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menjadi zaman kecerdasan, Sehingga atas Kuasa Nya Serta Ridho Nya lah Karya Ilmiah Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik namun masih jauh dari kata sempurna.

Dipersembahkan teruntuk mereka orang-orang yang peneliti Cintai dan Sayangi :

Alm Bapak dan Mama Serta Alm Abah Mertua dan Mama Mertua

Salam Hormat dan Terimakasih yang tak terhingga Kepada Orang Tua Peneliti baik yang telah berpulang ke Rahmatullah, maupun yang masih senantiasa menadahkan tangannya untuk mendo'akan, memberikan motivasi serta dukungan terbaik selama dalam menempuh masa perkuliahan.

Isteri dan Anak-anak Ku

Salam Sayang dan Terkasih Buat kalian yang sangat Peneliti Cintai...

Beb Rif'at Rahmawati S.ST., Bdn, Kedua Anakku Thalita dan Daffa' atas segala Do'a pengertian, dukungan serta semangat dan motivasi yang kalian berikan selama sejak awal menempuh perkuliahan hingga di tahap akhir menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendra Setiawan
NIM : 2320215310019
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Kesehatan

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banjarmasin, Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Hendra Setiawan
NIM. 2320215310019

SETIAWAN, HENDRA. 2025, TINDAKAN TENGA MEDIS TANPA PERSETUJUAN PASIEN DALAM SITUASI KEGAWATDARURATAN; Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing **Dr. Djoni S Gozali, S.H., M.Hum** 118 halaman.

RINGKASAN

Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa:

1. Ketentuan pengecualian Persetujuan Tindakan Medis dalam Pasal 293 ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memang telah memberikan dasar hukum eksplisit bagi tenaga medis untuk melakukan tindakan medis dalam kondisi gawat darurat tanpa perlu memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pasien atau keluarganya. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini masih menyisakan ambiguitas yuridis. Ditemukan bahwa tidak adanya kualifikasi lebih lanjut mengenai batasan objektif keadaan "tidak cakap" pasien dan ketentuan teknis mengenai "tidak adanya pihak yang dapat dimintai persetujuan", telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka celah kriminalisasi terhadap tenaga medis. Hal ini menyebabkan pasal yang seharusnya bersifat melindungi, menjadi kurang efektif dalam penerapannya karena masih multitafsir dan belum didukung perangkat hukum turunan yang operasional. Akibatnya, tenaga medis tetap berada dalam posisi rawan tuntutan hukum meskipun telah bertindak untuk menyelamatkan nyawa pasien dalam situasi darurat.
2. Penelitian juga menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma perlindungan hukum dalam praktik kegawatdaruratan berdampak langsung terhadap kehati-hatian tenaga medis yang berlebihan. Hal ini dapat menghambat pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat, serta berpotensi memperburuk kondisi pasien, terutama dalam tindakan penyelamatan nyawa seperti intubasi trakea, transfusi darah, dan tindakan bedah darurat. Kondisi ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan prinsip "primum non nocere" yang menjadi landasan etik profesi kedokteran. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan konseptual dengan teori Lifesaving dan Zaakwaarneming sebagai fondasi legitimasi tindakan medis darurat tanpa persetujuan. Studi ini merekomendasikan adanya reformulasi norma dalam bentuk peraturan pelaksana yang memperjelas batas-batas penerapan Pasal 293 ayat (9), serta mekanisme perlindungan hukum prosedural yang lebih operasional, seperti penetapan form baku laporan tindakan medis darurat dan pembentukan panel etik independen dalam kasus sengketa medis kegawatdaruratan.

SETIAWAN, HENDRA. 2025, TINDAKAN TENAGA MEDIS TANPA PERSETUJUAN PASIEN DALAM SITUASI KEGAWATDARURATAN; Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing **Dr. Djoni S Gozali, S.H., M.Hum** 118 halaman.

ABSTRAK

Kata kunci: perlindungan hukum, tindakan darurat, persetujuan tindakan medis, presumed consent, etika kedokteran

Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi tenaga medis yang melakukan tindakan medis darurat tanpa persetujuan pasien di Indonesia. Dalam kondisi kegawatdaruratan, dokter sering dihadapkan pada dilema hukum ketika harus segera mengambil tindakan penyelamatan nyawa, sementara prosedur persetujuan medis tidak memungkinkan karena kondisi pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang bertindak dalam keadaan darurat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, serta mengkaji sumber hukum primer seperti UUD 1945, KUHP, KUHPerdara, dan peraturan kesehatan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 memberikan perlindungan substantif dan prosedural, antara lain melalui pengakuan terhadap persetujuan yang dianggap ada (presumed consent) dalam keadaan darurat (Pasal 293 ayat (9)) serta kekebalan dari tuntutan jika tindakan sesuai dengan standar profesi (Pasal 275). Namun, ditemukan pula norma kontradiktif berupa ancaman sanksi pidana terhadap tenaga medis dalam Pasal 438 dan 440. Paradoks ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada keberanian pengambilan keputusan medis di ruang gawat darurat. Tesis ini menyimpulkan bahwa meskipun hukum telah mengatur perlindungan, harmonisasi lebih lanjut diperlukan untuk menyelaraskan norma perlindungan dan sanksi demi menjamin kepastian hukum bagi tenaga medis.

SETIAWAN, HENDRA. 2025, MEDICAL PERSONNEL ACTIONS WITHOUT PATIENT CONSENT IN EMERGENCY SITUATIONS; Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Supervisor **Dr. Djoni S Gozali, S.H., M.Hum** 118 pages.

ABSTRACT

Keywords: legal protection, emergency treatment, informed consent, presumed consent, medical ethics

This thesis analyzes the legal protection for medical personnel performing emergency medical actions without patient consent in Indonesia. In situations of emergency, doctors often face legal dilemmas when required to act swiftly to save lives, yet legal consent procedures may be impractical or impossible due to the patient's condition. The objective of this research is to examine whether current Indonesian laws, particularly Law No. 17 of 2023 on Health, adequately provide legal protection for medical professionals acting under emergency conditions. The research uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case approach, analyzing primary legal materials such as the 1945 Constitution, the Civil Code, the Criminal Code, and related health regulations. The findings show that Law No. 17/2023 offers both substantive and procedural protection, including presumed consent under emergency conditions (Article 293(9)) and immunity from liability when procedures align with professional standards (Article 275). However, paradoxically, the same law also contains provisions that impose criminal sanctions (Articles 438 and 440) on healthcare professionals in emergency contexts. This contradiction potentially leads to legal uncertainty and moral hazard in emergency decision-making. The thesis concludes that while the law seeks to balance patient rights and medical responsibilities, further regulatory clarity is needed to harmonize protective and punitive norms and ensure legal certainty for frontline healthcare workers.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan nikmat-Nya penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umat manusia, khususnya umat Islam sehingga bisa merasakan nikmat Islam yang Insya Allah sampai dengan akhir hayat penulis.

Tesis yang berjudul “ **TINDAKAN TENAGA MEDIS TANPA PERSETUJUAN PASIEN DALAM SITUASI KEGAWATDARURATAN** ”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Universitas Lambung Mangkurat. Dalam penyusunan Tesis ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
2. Bapak Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk memberikan masukan, arahan dan saran yang sangat berharga dalam proses penulisan Tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M.. selaku Penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga dalam penulisan Tesis ini
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat selama Penulis mengikuti proses perkuliahan di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Staf Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu

kelancaran dan kemudahan Penulis sejak awal mengikuti studi sampai akhir penyelesaian studi ini.

6. Seluruh keluarga besar Pandawa & Co Law Firm dan Rumah Advokasi Pelaut Indonesia serta Para Senior Advokat lainnya, atas bantuan dan pengalaman-pengalaman berharga.
7. Seluruh keluarga besar LBH Borneo Nusantara dan Borneo Law Firm yang pertama kali membimbing penulis memasuki dunia praktisi hukum hingga saat sekarang.
8. Seluruh sahabat Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2023, khususnya Pada konsentrasi Kesehatan yang sangat solid.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna untuk sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya bagi perkembangan hukum kesehatan.

Banjarmasin, Juli 2025

Hormat Penulis



Hendra Setiawan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
E. Tinjauan Pustaka	17
F. Metode Penelitian.....	25
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINDAKAN MEDIS KEGAWATDARURATAN TANPA PERSETUJUAN PASIEN.....	31
A. Hakikat Persetujuan Tindakan Medis Kedokteran (Persetujuan Tindakan Medis) Sebagai Landasan Hubungan Terapeutik.....	31
B. Pengecualian Kewajiban Persetujuan Tindakan Medis Dalam Situasi Kegawatdaruratan menurut Undang- Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	42
C. Prinsip – Prinsip Hukum dalam Tindakan Medis Kegawatdaruratan.....	56
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS YANG MELAKUKAN TINDAKAN TANPA PERSETUJUAN PASIEN DALAM TINDAKAN KEGAWATDARURATAN.....	78
A. Ketentuan Perlindungan Tenaga Medis Dalam Peraturan Perundang- Undangan	78
B. Kegawatdaruratan Sebagai Dasar Perlindungan Tenaga Medis	110
BAB IV PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	